

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara atau antar bangsa yang berisi aksi dan reaksi negara-negara berdaulat yang dipimpin oleh aktor negaranya masing-masing. Hubungan internasional terwujud karena adanya interaksi sosial dari aktor-aktor internasional dimana negara adalah aktor pertamanya. Dalam arti yang luas menurut Stephanie Lawson (2012), Hubungan Internasional adalah interaksi aktor-aktor negara yang melintasi batas negara. (Lawson, 2012:4)

Dalam istilah lain hubungan internasional yang merupakan sebagai terjemahan dari "*International Relation*" ini membahas tentang segala hubungan antar negara dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, dan tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak, dan cara berpikir dari manusia. (Darmayadi, 2015:23)

Dalam perkembangannya, hubungan internasional mengalami perubahan dalam pola interaksi yang semula hanya tentang interaksi bernuansa militer menjadi lebih mengarah kepada interaksi atau persaingan dalam sektor ekonomi, kebudayaan, teknologi dan sebagainya. Penyebabnya adalah era globalisasi yang merupakan fenomena yang memberikan perubahan yang besar terhadap seluruh aspek kehidupan didunia, termasuk hubungan internasional. Globalisasi diyakini

telah mengubah tatanan interaksi dalam hubungan internasional, sebagai akibatnya menambah kompleksitas pada lingkup kajian Hubungan Internasional itu sendiri. Oleh karena itu para penstudi juga wajib memperluas analisis observasinya, agar bisa beradaptasi pada era globalisasi.

Menurut Dr. Umar Suryadi dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hubungan Internasional menyatakan bahwa :

“Globalisasi muncul bersama fenomena lain seperti krisis kedaulatan negara, melemahnya sistem negara, terorisme, krisis hak asasi manusia dan lahirnya rezim-rezim internasional baru, membuat hubungan internasional telah dipaksa untuk keluar dari tema-tema tradisional dan menggarap agenda baru ke dalam studi ini. Isu-isu baru yang telah menjadi bagian kajian hubungan internasional saat ini seperti masalah gender, perdagangan manusia, isu kemiskinan, teknologi, masalah keuangan internasional lainnya yang tidak hanya menjadi agenda baru melainkan sebagai pelengkap terhadap isu-isu konvensional yang masih dan tetap memiliki relevansinya.” (Suryadi, 2017:9)

Dr. Umar mengungkapkan bahwa globalisasi yang didukung oleh fenomena lain menjadi penyebab bertambahnya agenda-agenda baru dalam hubungan internasional, namun bukan berarti agenda lain usang melainkan sebagai pelengkap yang akan menjadikan kajian hubungan internasional menjadi sebuah disiplin yang dinamis.

Karena kedinamisan hubungan internasional, dengan sendirinya fokus kajian, metode, dan teori dalam hubungan internasional dapat berubah. Hal ini menjadikan hubungan internasional menjadi kajian yang makin meluas seiring perkembangan zaman. (Bob, 2017:12)

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep yang menjadi bagian dari hubungan internasional. Kepentingan nasional pasti dimiliki oleh semua negara dan menjadikannya sebagai strategi dalam hubungan internasional. Setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut karena negara merupakan aktor paling dominan dalam menjalankan peran untuk mencapai sebuah kepentingan nasional.

Kepentingan nasional memiliki arti yang beragam. H.J Morgenthau (1951) mengartikan kepentingan nasional sebagai berikut :

“Kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan bukti diri fisik, politik dan kultur menurut gangguan negara lain. Dari tinjauan ini, para pemimpin negara merumuskan kebijakan khusus terhadap negara lain yg sifatnya kerjasama atau konflik.” (Morgenthau, 1951:t.h)

Morgenthau (2013) telah membagi kepentingan nasional menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kepentingan nasional primer dan sekunder. Kepentingan nasional primer merupakan kepentingan nasional yang paling vital yakni menyangkut identitas fisik, politik, budaya, keamanan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Singkatnya, kepentingan nasional ini bersifat tidak bisa di kompromikan, bahkan suatu negara akan rela berperang untuk hal tersebut. Sedangkan kepentingan nasional sekunder adalah sebaliknya. Kepentingan nasional sekunder meliputi hal masih bisa di kopromikan atau diupayakan melalui sebuah diplomasi atau negosiasi. (Hans J. Morgenthau, 2013:425-419)

Rosenau (2006) dalam Andre juga membagi kepentingan nasional kepada beberapa bagian, yakni :

1. Kepentingan primer (*primary interest*), yang meliputi perlindungan identitas dan keamanan fisik, politik dan budaya negara dari ancaman eksternal. Kepentingan utama tidak dapat dilanggar atau diperjualbelikan, semua negara di dunia memiliki kepentingan tersebut dan harus melindunginya semaksimal mungkin.
2. Kepentingan sekunder adalah kepentingan yang ditujukan ke luar negeri, misalnya perlindungan aset negara di luar negeri, perlindungan warga negara lain, dan kekebalan warga negara dari diplomat adalah manfaat.
3. Kepentingan abadi, adalah kepentingan yang cenderung konstan dalam jangka waktu yang lama, yang berubah dari waktu ke waktu, tetapi cenderung berkembang secara perlahan, misalnya Australia selama berabad-abad tertarik untuk mempertahankan kepentingan politik dengan Inggris hingga hari ini.
4. Suku Bunga Variabel (*Non-Fixed Interest Rate*), suku bunga ini merupakan fungsi dari kepribadian, opini publik, kepentingan politik dan etika partisan yang berlaku pada saat itu. Dengan kata lain, variabel-variabel tersebut sering disebut sebagai kepentingan nasional karena perubahannya sangat cepat.
5. Kepentingan bersama (*public interest*), adalah kepentingan yang dapat diterapkan oleh Negara dalam bentuk yang wajar dan umum atas

wilayah geografis yang luas dari banyak negara, atau dalam sejumlah wilayah yang bersifat spesifik seperti ekonomi, perdagangan, diplomasi, hukum internasional, dll).

6. Kepentingan khusus adalah kepentingan yang cenderung lebih dekat dengan waktu dan/atau tempat dan seringkali merupakan hasil logis dari kepentingan umum. (Andre, 2017)

Sementara itu, menurut Dr. Umar (2017) Kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang paling populer di hubungan internasional. Selama negara masih menjadi aktor dominan, maka konsep ini dinilai akan menjadi konsep yang khas dalam hubungan internasional. Dalam bukunya, Dr. Umar menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan motivasi suatu negara dalam menjalankan kebijakan eksternal. (Dr. Umar, 2017:58)

2.1.3 Diplomasi

Semua aktor internasional yakni sebuah negara memiliki kepentingan maupun target sehingga aktivitas maupun kebijakan luar negeri dapat terarahkan. Selain itu, aktor-aktor hubungan internasional juga selalu ingin mempertahankan keberadaannya di dunia internasional. Untuk dapat mencapai sasaran dan kepentingan tersebut, dibutuhkan sebuah diplomasi. Secara etimologi, diplomasi berasal dari bahasa Yunani yakni diploma, yakni surat yang dilipat. Selain itu kata diploma dekat artinya dengan duplikasi yang berarti menggandakan atau melipat dua. Surat yang dilipat cenderung mengarah pada dokumen negara dengan itu diplomasi diartikan sebagai pekerjaan orang yang menyimpan dokumen negara. (Shoelhi, 2011:74)

Kebijakan nasional dipengaruhi oleh faktor eksternal dan apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, hubungan dan pemantauan dengan negara lain dengan "jarak" yang besar dianggap tidak efisien, dan diperlukan dialog dan hubungan antar negara. Diplomasi digunakan untuk berdialog atau berkomunikasi antara suatu negara bersama negara lain yang jaraknya melewati batas negara. Dalam melakukan obrolan tersebut, dikenal sebuah kata yang berkaitan erat dengan diplomasi, yaitu diplomat. Dr. Mohammad Shoelhi (2011) dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Dalam hubungan antarnegara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak level paling awal sebuah negara yang hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya menyepakati atau mengembangkan hubungan yang lebih lanjut. Diplomasi berarti penyelenggaraan hubungan secara resmi antara satu negara dengan negara lain, atau urusan kepentingan sebuah negara yang dilakukan oleh prantara wakilnya di negara lain. Diplomasi juga berarti pengetahuan dan kecakapan dalam membina hubungan antara satu negara dengan negara lain” (Shoelhi, 2011:74)

Keberhasilan atau kegagalan suatu praktik demokrasi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain merupakan communication (komunikasi) & recognition (pengakuan). Salah satu aspek atau faktor yg perlu diperhatikan pada praktik diplomasi, merupakan komunikasi. Mengibaratkan komunikasi menjadi darah pada tubuh manusia. Artinya, bila komunikasi pada sebuah praktik diplomasi berhenti, maka politik internasional sekaligus diplomasi yang sedang terjalin akan terputus. Sebagai dampaknya, pertarungan dan kekerasan bisa saja terjadi. Selain komunikasi, aspek krusial lainnya yakni recognition, atau pengakuan. Pengakuan diibaratkan menjadi “jantung” dari diplomasi. (Kusuma, 2017:t.h)

Berbicara Diplomasi dan praktinya dalam komunikasi, menurut Deddy Djamaluddin Malik (1993), diplomasi adalah komunikasi tatap muka atau telekomunikasi yang dilakukan untuk menjalin dan mempererat hubungan antara suatu negara dengan negara lain guna mencapai suatu kepentingan bersama yang telah disepakati. Dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain, pemerintah akan mengirimkan wakilnya yakni diplomat yang telah menguasai banyak pengetahuan tentang negara lain atau negara yang dituju. Oleh karena itu, dalam proses mengumpulkan informasi terkait negara lain, seorang diplomat akan memantau berbagai sarana informasi tentang negara bersangkutan, dalam sebuah media informasi seperti di televisi atau siaran internet. (Malik, 1993:t.h)

Dengan demikian diplomasi dapat disimpulkan sebagai metode untuk menyampaikan sebuah amanat atau pesan melalui sebuah perundingan yang bertujuan mencapai sebuah kepentingan ekonomi, politil, perdagangan, sosial, budaya, keamanan, militer, dan berbagai kepentingan lain yang menyangkut hubungan internasional. Diplomasi menggunakan seni perundingan dimana sesuai dengan tujuan diplomasi itu sendiri yakni mencapai sebuah tujuan dengan perdamaian. Perang akan digunakan sebagai opsi terakhir dalam sebuah diplomasi apabila diplomasi secara perundingan tidak menjadi sebuah jalan keluar.

2.1.4 Diplomasi Publik

Terdapat dua definisi yang digunakan oleh Signtzer dari Coombs dalam Tiffany (2020) untuk memahami diplomasi publik yakni adalah sebagai cara dimana pemerintah dan individu maupun kelompok pribadi dapat secara langsung

atau tidak langsung memengaruhi keputusan politik luar negeri dari pemerintah lain.

”Diplomasi publik memperluas kegiatan diplomasi tradisionalnya dari ranah politik tinggi, menangani masalah dan aspek kehidupan sehari-hari yang sangat beragam dan lingkup tertutup pemerintah dan politisi. diplomasi melibatkan aktor dan kelompok sasaran baru, yaitu individu, kelompok, dan institusi yang berbeda, bergabung masyarakat internasional. komunikasi dan aktivitas antarbudaya dan mempengaruhi hubungan politik antar negara. Berdasarkan acuan di atas, semua pihak dapat menjadi aktor dalam diplomasi.” (Tiffany, 2020:202)

Dikalangan para diplomat diplomasi publik diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dengan cara menyebarkan informasi untuk mempengaruhi masyarakat internasional. Istilah diplomasi publik pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965. Edmund dalam Shoelhi (2011) mendefinisikan diplomasi publik sebagai berikut :

“Diplomasi publik adalah diplomasi yang dijalankan oleh tokoh-tokoh non-pemerintah atau kelompok masyarakat untuk mempengaruhi opini publik dan memberikan kesadaran untuk membentuk citra positif tentang diri atau sebuah lembaga yang menaunginya dengan menggunakan cara yang dapat diterima.” (Shoelhi, 2011:157)

Dewasa ini, kegiatan diplomasi meningkat sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya informasi-informasi pada hubungan internasional. Hubungan internasional pun tidak lagi semata-mata dicermati sebagai interaksi antarnegara, juga mencakup interaksi antarmasyarakat internasional. Dengan demikian, diplomasi tradisional, atau yang dikenal menggunakan kata *first track diplomacy*, yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tentu saja tidak akan efektif pada rangka membicarakan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara. Oleh karena itu, kegiatan diplomasi publik yg

melibatkan kiprah dan publik akan sangat diperlukan pada rangka melengkapi kegiatan diplomasi tradisional. (Benny, 2008:1)

Alasan utama keterlibatan publik ini didasarkan pada perkiraan yang relatif sederhana, yaitu pemerintah tidak selalu bisa menjawab aneka macam tantangan pada informasi-informasi diplomasi yang sekarang semakin kompleks, terlebih-lebih sifat khas yang melekat berdasarkan pemerintah sangat kaku. Melalui peningkatan kegiatan diplomasi publik, pemerintah berharap bahwa upaya diplomasi akan berlangsung lebih efektif dan menaruh efek yang lebih luas dan besar dalam masyarakat internasional. Di samping itu, pemerintah pun berharap keterlibatan publik ini bisa membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah, sekaligus bisa memberikan masukan dan cara pandang yang tidak sama dalam memandang suatu masalah.

Pengalaman mengikuti Aktivitas Diplomatis Publik yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri menaruh citra untuk menjalan kegiatan diplomasi dalam membentuk image bangsa berperan aktif membentuk perdamaian global. Diplomasi publik menjadi krusial dalam merajut persahabatan antarbangsa. Peranan diplomasi publik diperlukan untuk menaruh gambaran positif terhadap politik luar negeri suatu negara. Citra positif terhadap citra tentang kehidupan dinamika politik akan menaruh citra yang positif bagi dunia untuk meningkatkan kerja sama antarnegara. Fokus dialog bukan semata-mata hanya untuk saling mengerti akan kebudayaan yang berbeda. Namun lebih mendalam yang artinya

menciptakan sebuah keyakinan bahwa suatu bangsa mempunyai potensi untuk menjalin kerja sama dalam seluruh aspek politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Menurut Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI dan Dewan Nasional Setara, Benny Susetyo dalam sebuah jurnal Peranan Diplomasi Publik, Benny menyatakann bahwa :

“Diplomasi publik bisa menjembatani segala perbedaan. Inilah yang merupakan bagian penting pada misi diplomasi publik menyebarkan sebuah cara berpikir, bertindak, berelasi untuk terus mengembangkan komunikasi antarnegara. Kultur komunikatif sepertinya dimiliki para staf diplomasi publik yang mempunyai kemampuan untuk membaca peta politik dunia menggunakan potensi ekonominya yang dalam gilirannya akan membuatkan perilaku terbuka terhadap potensi sumber daya alam kita. Kemampuan ini dalam akhirnya akan menerima nilai tambah. Diplomasi publik adalah sebuah kebutuhan mengembangkan politik diplomasi yang lebih menyentuh aspek budaya dan komunikasi iman.” (Benny, 2008:1)

Pada intinya, diplomasi publik memegang peran penting dalam menjalankan misi diplomasi negara. Terlebih saat ini situasi semakin menuuntut integrasi beragam dalam berbagai bidang. Meski bagaimanapun juga diplomasi publik tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan publik dalam aktifitas diplomasinya.

Menurut Nye (2004) menyatakan bahwa ada tiga aspek diplomasi publik. Yang pertama adalah komunikasi sehari-hari, yang melibatkan penafsiran konteks keputusan kebijakan dalam dan luar negeri. Di era internet yang dibanjiri informasi, aspek ini sangat penting untuk menegaskan dan menjelaskan posisi pemerintah, terutama untuk bersiap menghadapi krisis di mana pemerintah harus meningkatkan komunikasi terkait konten. yang tampak bertentangan dengan nilai-nilai Negara. Yang kedua adalah komunikasi strategis yang mengembangkan tema sederhana,

seperti dalam kampanye politik atau iklan. Kampanye ini menyelenggarakan acara simbolik atau bertema media sepanjang tahun untuk menciptakan branding berdasarkan tema sentral atau untuk mempromosikan kebijakan pemerintah tertentu. Yang ketiga dari diplomasi publik adalah membangun hubungan yang langgeng dengan para pemain kunci selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, atau melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi dan akses ke media (Joseph Nye, 2004).

2.1.5 *Soft-Power Diplomacy*

Istilah *soft power diplomacy* pertamakali dikenalkan oleh Joseph S Nye yang seorang dosen di *The Kennedy School*, Amerika Serikat. *Soft power* merupakan kemampuan untuk mensugesti orang lain untuk menerima output yang diinginkan melalui daya tarik daripada paksaan atau pembayaran. *Soft Power* suatu negara terletak dalam sumber daya budaya, nilai, dan kebijakannya. Strategi smart power menggabungkan asal daya hard & soft power. Diplomasi ini merupakan macam tersendiri atau merupakan bagian dari diplomasi publik. (Shoelhi, 2011:83)

Shoelhi dalam bukunya *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional* menyatakan bahwa :

“*Soft power* adalah diplomasi dengan mengandalkan kekuatan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan lawan dari *hard power* yang mengandalkan pada kekuatan militer.dengan kata lain *soft power* adalah kemampuan dalam mengambil hati orang lain dalam mendapatkan apa yang diinginkan.” (Shoelhi, 2011:84)

Berbeda dengan Joseph Nye yang pertama kali mendefinisikan konsep diplomasi sebagai keahlian suatu negara untuk mencapai tujuannya melalui aksi,

termasuk didalamnya nilai, kebudayaan, kebijakan luar negeri dan jenis lainnya yang tidak terikat dengan unsur kekuatan militer dan kecaman. Selain itu Joseph Nye (2004) mendefinisikan ulang *soft power diplomacy* sebagai keterampilan untuk mempengaruhi negara lain melalui kerjasama dalam membentuk agenda, mengajak serta melakukan suatu kegiatan positif guna memperoleh hasil akhir yang didambakan. (Joseph Nye, 2004)

2.2 Kerangka Pemikiran

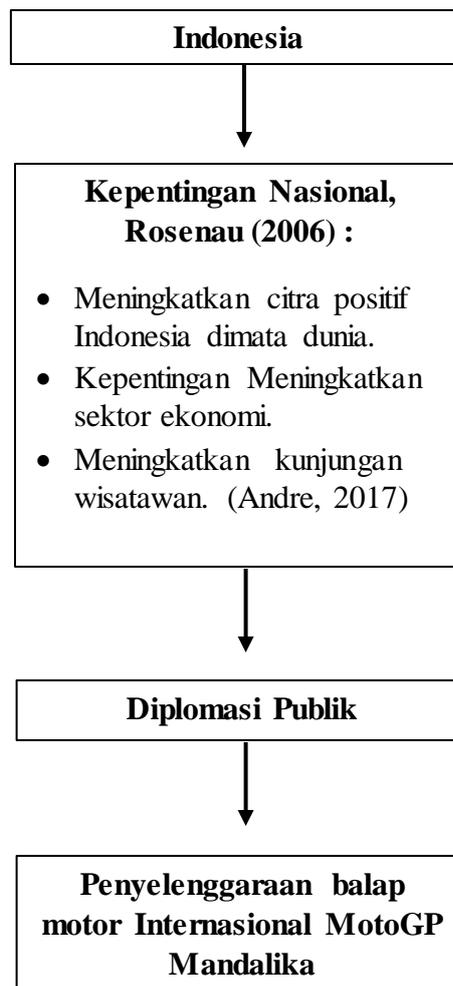
Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Salah satu bagian kepentingan nasional menurut Rosenau (2006) dalam Andre adalah *General Interest* atau **Kepentingan-kepentingan umum**, yakni kepentingan dimana sebuah negara dapat menetapkannya dalam bentuk yang tepat dan umum di sebuah wilayah dengan geografis yang luas pada sejumlah besar negara, atau pada beberapa kepentingan yang bersifat khusus seperti perdagangan, diplomatik, ekonomi, hukum internasional, dan lain sebagainya. (Andre, 2017)

Ada beberapa bentuk kerjasama internasional untuk mewujudkan pola interaksi dalam hubungan internasional. Kerja sama internasional merupakan salah satu bidang urusan internasional yang perlu diterapkan oleh negara-negara untuk memastikan kelangsungan hidup negaranya, dalam hal ini adalah diplomasi publik. Kolaborasi yang disebutkan dalam penelitian ini berlangsung antara Indonesia dan MotoGP untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, entah bagaimana berkolaborasi di bidang olahraga melalui lembaga dan organisasi pemerintah.

Kerjasama antara Indonesia dan MotoGP bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat dari masing-masing kepentingan tersebut. Minat yang dimaksud diwujudkan melalui kerjasama di bidang olahraga. Kerjasama ini dilakukan oleh lembaga pemerintah, Kementerian Pemuda Olahraga, Pengurus Kawasan Pariwisata Mandalika bersama dengan Sirkuit Internasional Mandalika Indonesia dan Dorna MotoGP. Kerjasama antara Indonesia dan MotoGP memiliki arti yang sama. Melalui MotoGP, negara-negara peserta dapat mengembangkan ekonominya melalui industri olahraga. MotoGP bekerjasama dengan Indonesia dapat lebih mengembangkan MotoGP dan meningkatkan penonton untuk motorsport internasional ini di berbagai daerah. Dari pasar luar negeri dalam industri pariwisata. Indonesia juga merupakan negara dengan peminat MotoGP terbanyak, dan Indonesia masih memiliki jumlah pengendara sepeda motor yang signifikan, menjadikan Indonesia pasar yang cocok bagi produsen sepeda motor.

Indonesia sendiri memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan MotoGP 2022 di Mandalika yang baru saja diresmikan pada tahun 2021. Melalui penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika yang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika, Indonesia berusaha memperkenalkan kekayaan alam dan budaya yang sangat indah dan dapat dinikmati oleh setiap orang yang berkunjung untuk menonton MotoGP yang digelar. Karena Indonesia tidak hanya menargetkan gelar MotoGP, tetapi Indonesia juga menargetkan sektor pariwisata dan ekonomi kawasan Mandalika.

Dengan dijadikannya Indonesia sebagai salah satu negara yang akan menggelar ajang balap bergengsi taraf global, maka nama Indonesia pada kancah dunia akan kembali terdengar. Penonton dari di dunia mampu melihat hal tersebut sebagai salah satu tanda kemapanan suatu negara. Stigma yang melekat pada Indonesia menjadi negara yang terbelakang dan primitif akan perlahan menghilang. Dengan begitu citra positif akan terbentuk mengenai Indonesia yang juga akan berdampak pada sektor pariwisata Indonesia yang layak untuk dikunjungi.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

(Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2022)

